

Pengembangan Pariwisata dan Pengentasan Kemiskinan

Kusuma Wulandari¹, Nur dyah Gianawati², Franciscus Adi Prasetyo³

^{1,2,3}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember, Jember

Abstrak

Pembangunan pariwisata menjadi salah satu unggulan dalam pembangunan desa terutama dalam upaya mengurangi kemiskinan. Pro-Poor Tourism (PPT) merupakan perspektif pariwisata yang berupaya membawa berbagai manfaat bagi masyarakat miskin, termasuk manfaat sosial, lingkungan dan budaya selain manfaat ekonomi. PPT tidak bertujuan memperluas ukuran sektor, tetapi membuka peluang bagi masyarakat miskin dalam pariwisata, di semua tingkat dan skala. Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif-deskriptif. Penentuan informan dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Pengolahan data penelitian ini dimulai dengan menelaah seluruh data, menyusun transkrip hasil wawancara, membuat koding data, membuat kategorisasi data, menyusun kesimpulan sementara, analisis dan menyusun kesimpulan akhir. Penelitian ini bertujuan menganalisis dan membahas pengembangan pariwisata berbasis komunitas dan pengurangan kemiskinan berdasarkan perspektif *Propoor Tourism* (PPT). Pengembangan desa wisata di Glingseran telah memberikan manfaat bagi masyarakat desa, yaitu melepaskan predikat desa miskin sehingga pengembangan desa wisata telah sesuai dengan filosofi perspektif Pro-Poor Tourism (PPT) yang berorientasi pada pemberian manfaat ekonomi, antara lain menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa. Budaya masyarakat Glingseran seperti Solawatan dan Sedekah bumi hidup kembali dengan adanya wisata desa.

Kata Kunci: kemiskinan, pariwisata, perspektif pro-poor.

Abstract

Tourism development is one of the mainstays in village development, especially to reduce poverty. Pro-Poor Tourism (PPT) is a tourism perspective that seeks to bring various benefits to the poor, including social, environmental, and cultural benefits in addition to economic benefits. PPT does not aim to expand the size of the sector, but opens opportunities for the poor in tourism, at all levels and scales. The approach in this research is qualitative-descriptive. Determination of informants was done by using purposive sampling technique. The data processing of this research went through some stages such as reviewing all data, compiling transcripts of interview results, coding data, categorizing data, compiling temporary conclusions, analyzing and compiling final conclusions. This study aims to analyze and discuss the development of community-based tourism and poverty reduction based on the perspective of Pro-Poor Tourism (PPT). The development of a tourism village in Glingseran has provided benefits for the village community, namely releasing the title of poor village so that the development of a tourism village is in accordance with the philosophy of the Pro-Poor Tourism (PPT) perspective which is oriented to providing economic benefits, including creating jobs for rural communities. The culture of the Glingseran people, such as Solawatan and Sedekah Bumi, has come back to life with village tours.

Keywords: poverty, tourism, pro-poor perspective.

Pendahuluan

Kemiskinan merupakan permasalahan yang mendesak dan memerlukan langkah penanganan dan pendekatan yang menyeluruh. Program pengurangan kemiskinan tidak menyetuh pada akar permasalahannya tapi hanya pada gejalanya saja Sunyoto dan Widayati (2021). Berdasarkan amanat SDGS tujuan yang dirancang oleh pemerintah Indonesia yaitu menghapus segala bentuk kemiskinan selama 15 tahun ke depan. Salah satu target yang ingin dicapai adalah menjamin masyarakat miskin untuk mendapatkan kesejahteraan Nursetiawan (2018)

Desa Glingseran merupakan salah satu desa yang sangat tertinggal di antara 219 desa yang tersebar di 23 kecamatan yang ada di Kabupaten Bondowoso. IDM (Indeks Desa Membangun mengklasifikasi desa dalam lima (5) status, yakni: (i) Desa Sangat Tertinggal; (ii) Desa Tertinggal; (iii) Desa Berkembang; (iv) Desa Maju; dan (v) Desa Mandiri. Nilai rata-rata nasional Indeks Desa Membangun ditetapkan sebagai berikut: 1) Desa Sangat Tertinggal : < 0,491 2, 2) Desa Tertinggal : > 0,491 dan < 0,599 3, 3) Desa Berkembang : > 0,599 dan < 0,707 4, 4) Desa Maju : > 0,707 dan < 0,815 5, 5) Desa Mandiri : > 0,815 6. Berdasarkan data sekunder yang diperoleh desa Glingseran merupakan desa sangat tertinggal dengan nilai IDM 0.4882 (IDM Bondowoso Tahun 2017). Namun demikian desa ini mempunyai aset sumber daya lingkungan berupa keindahan alam yaitu air terjun, sungai dan sumber mata air.

Melihat potensi yang dimiliki oleh Desa Glingseran, Pengembangan pariwisata mejadi salah satu program unggulan dalam pembangunan desa. Pengembangan pariwisata yang dirancang secara berkelanjutan dan melibatkan partisipasi masyarakat secara menyeluruh akan memberikan dampak pembukaan lapangan pekerjaan selain itu juga dapat memberikan pemasukan bagi masyarakat desa. oleh sebab itu pariwisata mempunyai peran penting dalm pembangunan terutama dalam pengurangan kemiskinan Rusyidi (2018).

Bryden (1973), menyatakan pembangunan pariwisata dan pertumbuhan ekonomi mempunyai hubungan mutualisme untuk mengentaskan kemiskinan. Sejalan dengan (Bryden ,1973; Ashley, C., et. al., 2001) menyatakan pariwisata menjadi sarana yang efektif untuk menurunkan kemiskinan. Pro Poor Tourism (PPT) berpengaruh signifikan terhadap terbukanya kesempatan kerja baru, terjadinya peningkatan pendapatan, kesejahteraan masyarakat, bertumbuhnya pelaku kegiatan ekonomi mikro, dan berkurangnya jumlah penduduk miskin. Adanya hubungan langsung antara keuntungan ekonomi dan non-ekonomi bagi masyarakat miskin dalam penerapan PPT, serta dampak positif pariwisata terhadap masyarakat miskin (Spenceley, A., and Seif, J., 2003; Darmawan & Yunanto, 2016).

Tujuan dari tulisan ini adalah bagaimana pengembangan pariwisata berbasis komunitas dan pengurangan kemiskinan berdasarkan perspektif Pro Poor Tourism (PPT). Tulisan mengenai pengembangan pariwisata berbasis komunitas dan pengurangan kemiskinan banyak dilakukan seperti model pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di Kabupaten Bangka dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu tahap awal, tahap pertengahan dan lanjut Binahayati Rusyidi (2018). Kajian mengenai potensi wisata dalam pemberdayaan masyarakat melalui proses perencanaan, pengambilan keputusan dan pengawasan program pengembangan desa wisata bayan seperti, tata kelola homestay, pengembangan skill, menjalin hubungan kerjasama dengan para stakeholder dan meningkatkan kemampuan usaha masyarakat Hannaji et al. (2022). Kajian terkait pembangunan pariwisata dapat menurunkan kemiskinan dengan cara keterlibatan sektor masyarakat secara luas, Pemberdayaan penduduk lokal untuk mendorong partisipasi yang lebih besar dalam perencanaan dan pengambilan keputusan mengenai pengembangan pariwisata melibatkan sektor swasta Scheyvens dan Momsen (2008). Berdasarkan penelusuran literature dapat dijelaskan bahwa kedudukan tulisan ini dengan tema dan fokus yang sama berbeda dalam perspektif yang digunakan

dalam menganalisis pengembangan pariwisata berbasis komunitas dengan perspektif PPT.

Pembangunan pariwisata berkelanjutan tidak hanya menekankan adanya keberlanjutan sumber daya alam, dan ekonomi, tetapi juga keberlanjutan sumber daya sosiokultural. pembangunan pariwisata berkelanjutan ketiga hal itu bersinergi sehingga tiga elemen pariwisata, yaitu masyarakat setempat, wisatawan, dan sumber daya, dapat berjalan secara simbang dan harmonis serta terjaga kualitasnya Mudana (2016).

Strategi penanggulangan kemiskinan berbasis komunitas melalui sektor pariwisata, perlu memperhatikan tiga hal sebagai berikut: (1) pelaku/stake holders, (2) kelembagaan, (3) kebijakan yang *propoor*, terintegrasi dan berkesinambungan Sunyoto dan Widayati (2021). Pelaku/stake holders, Keterlibatan pelaku dalam pengembangan pariwisata meliputi masyarakat, pemerintah, swasta dan kelompok peduli. Masyarakat tidak lagi sebagai obyek tetapi sebagai subyek dalam kegiatan kepariwisataan. Masyarakat terlibat langsung dalam pengelolaan pariwisata di wilayahnya, sejak dari perencanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi. Masyarakat sebagai pengelola pariwisata di wilayahnya, pemilik guest house/home stay, pemandu lokal, penyedia konsumsi, supplier oleh-oleh/souvenir dan pemain atraksi serta masih banyak lagi.

Kelembagaan, sebagai wadah berkumpulnya masyarakat untuk bermusyawarah dalam rangka mendiskusikan potensi sumberdaya yang dimiliki maupun permasalahan yang dihadapi, pengambilan keputusan strategis dan meningkatkan kemampuan bernegosiasi perlu dikembangkan adanya kelembagaan. Kelembagaan sebagai representasi dari masyarakat (miskin). Kelembagaan ini hendaknya merupakan sebuah kelembagaan yang transparan dan akuntabel, sehingga dipercaya oleh masyarakat maupun pihak lain untuk melakukan kemitraan dalam rangka pengembangan pariwisata. Pengorganisasian masyarakat diperlukan guna menggali kesadaran masyarakat terhadap kondisi dan permasalahan yang dihadapi dan kebutuhan menggalang potensi kepariwisataan agar lebih

peka dan tanggap serta mampu menjawab perubahan yang terjadi.

Kebijakan yang *propoor*, terintegrasi dan berkesinambungan, Salah satu penyebab kemiskinan adalah adanya kebijakan yang tidak memihak pada warga miskin, oleh karenanya diperlukan kebijakan yang memihak warga miskin, sehingga dapat membuka kesempatan usaha, membuka akses ke sumberdaya dan informasi. Kebijakan yang sektoral dan tidak berkesinambungan menyebabkan kegiatan penanggulangan kemiskinan tidak dapat mencapai hasil yang optimal. Oleh karenanya dibutuhkan kebijakan yang terpadu dan berkesinambungan. Dalam hal ini sangat dibutuhkan peran birokrasi dan upaya good governance dengan menjalankan fungsi 4 tor (Fasilitator, Koordinator, Motivator, Inovator).

Pro-Poor Tourism' (PPT), merupakan perspektif pembangunan pariwisata berkelanjutan. Pariwisata yang berupaya membawa berbagai manfaat bagi masyarakat miskin, termasuk manfaat sosial, lingkungan dan budaya di samping manfaat ekonomi. PPT tidak bertujuan untuk memperluas ukuran sektor, tetapi untuk 'membuka peluang bagi masyarakat miskin dalam pariwisata, di semua tingkat dan skala operasi' (Ashley et al. 2001:13; dalam Scheyvens & Momsen, 2008). Perspektif yang bertujuan untuk memastikan bahwa pariwisata memberikan lebih banyak manfaat bersih bagi masyarakat miskin, dapat memainkan peran penting dalam mengurangi kemiskinan.

Pariwisata prop-miskin Pro-Poor Tourism' (PPT) memahami pariwisata secara holistik, sebagai suatu sistem. Oleh karena itu, dari sudut pandang industri tidak hanya melihat pariwisata saja, tetapi PPT juga mempertimbangkan sektor lain seperti layanan arsitektur untuk resort, sistem komunikasi untuk sistem reservasi global, dll. Bagaimana pariwisata digambarkan, tidak hanya terdiri dari hotel, maskapai penerbangan atau apa yang disebut "industri pariwisata", melainkan "sistem komponen utama yang dihubungkan bersama dalam hubungan yang intim dan saling bergantung. Ini adalah salah satu cara untuk menggambarkan sistem pariwisata yang

berfungsi” (Gunn & Var, 2002, hal. 35; Scaglione et al., 2011)

Dalam mengadopsi pandangan holistik ini, integrasi dapat dilihat, yang memungkinkan pengembangan yang lebih luas, tidak hanya berpusat pada pariwisata, tetapi juga dengan kemungkinan peluang untuk titik masuk untuk tema-tema seperti mobilisasi sosial dan pemberdayaan masyarakat (Sofield, dkk., 2004, hal. 8; Scaglione et al., 2011)

Strategi atau metode Pro-Poor Tourism' (PPT) yaitu: 1) Peningkatan manfaat mata pencaharian ekonomi dan non-tunai. 2) Meningkatkan kebijakan dan mengurangi dampak negatif seperti intrusi budaya, atau kehilangan. 3) Meningkatkan penyediaan pelatihan, pemasaran, kredit dan dukungan teknis untuk pengusaha lokal, pengembangan pendapatan kolektif masyarakat melalui kegiatan berbasis pariwisata, dan meningkatkan akses ke layanan dan infrastruktur. 4) Menciptakan kerangka perencanaan yang lebih mendukung, meningkatkan partisipasi masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan dan memfasilitasi kemitraan PPT dengan sektor.

Prinsip-prinsip Pro-Poor Tourism' (PPT) adalah 1) pariwisata dipahami sebagai suatu sistem. 2) menyeluruh. 3) integrasi vertikal & horizontal, kerangka kerja. 4) fokus pada komunitas secara keseluruhan; sektor populasi yang tertindas, minoritas pribumi. 5) penilaian berdasarkan juga interaksi dan hubungannya dengan modal sosial. 6) Tujuannya adalah untuk meningkatkan dampak terhadap kemiskinan dan membantu orang miskin mengakses pasar internasional memberdayakan sebagai konsep multidimensi 7) aspek multidimensi ini diterapkan mengingat setiap aktor dapat membangun hubungan bahkan sebagai individu. Akibatnya, tingkat pemberdayaan lebih kaya dalam pendekatan PTT karena tidak hanya kepadatan hubungan yang lebih besar, tetapi juga jangkauan aktor yang lebih luas tidak hanya berdasarkan lingkungan sosial tetapi juga pada tingkat politik. 8) Dapat meningkatkan partisipasi masyarakat pada berbagai sektor pariwisata. PPT bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, meningkatkan

manfaat sosial pariwisata, dan mengurangi. Scaglione et al. (2011).

Metode

Pendekatan dalam penelitian kualitatif. Jenis penelitian deskriptif. Sumber data penelitian ini mencakup data primer dan data sekunder. Penentuan informan dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik Pengumpulan data: Wawancara yang digunakan untuk memperoleh data primer penelitian ini adalah wawancara mendalam (in-depth interview). Pengolahan dan Analisis Data: Pengolahan data penelitian ini dimulai dengan menelaah seluruh data menyusun transkrip hasil wawancara, membuat koding data, membuat kategorisasi data, menyusun kesimpulan sementara, analisa dan menyusun kesimpulan akhir. Teknik koding data untuk analisis data penelitian ini dilakukan dengan cara menyortir dan mengklasifikasi data (sort and classify), pengkodean data (open coding, axial coding, selective coding), dan tahap yang terakhir adalah interpretasi dan elaborasi (interpret and elaborate). Creswell (2014). Adapun analisis data dalam penelitian ini menggunakan tahapan yang sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1994) yakni: Data reduction (reduksi data). Data display (penyajian data). Conclusion drawing/ verification (verifikasi data). Neuman (2016). Lokasi Penelitian Penelitian ini dilakukan di Desa Glingseran, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso. Penentuan lokasi didasarkan pada teknik purposive. Waktu Penelitian: Tahun 2019

Hasil dan Pembahasan

Dalam pengembangan desa wisata ada beberapa tahapan yang dilakukan yaitu latar belakang pengembangan desa wisata, pendekatan desa wisata dan perencanaan desa wisata. Latar belakang desa wisata adanya inisiasi kepala desa yang dibantu Adik adik KKN untuk membangun desa dengan cara melakukan eksplorasi potensi aset alam yang dimiliki desa. Ide pengembangan desa wisata sangat di dukung oleh masyarakat desa akan tetapi masyarakat desa sangat buta mengenai wisata sebagai upaya kesungguhan kepala desa untuk pengembangan desa wisata ditujukan dengan cara mendatangkan ahli pariwisata

dari luar desa Glingseran yang berperan sebagai mentor wisata bagi masyarakat desa untuk mengajarkan mengenai wisata dan manajemen wisata untuk masyarakat. Keinginan kepala desa agar desanya maju dengan adanya desa wisata karena pada waktu itu icon Kabupaten Bondowoso adalah wisata maka dari itu upaya untuk mendukung Pembangunan Kabupaten desa Glingseran melakukan pengembangan desanya dengan mengeksplor sumberdaya desanya.

Pendirian desa wisata sangat didukung oleh masyarakat dan didasarkan pada aset yang dimiliki masyarakat desa. Dalam Prosesnya perencanaan desa wisata menggunakan agen dari luar desa sebagai planer desa wisata. Visi yang ingin dicapai dalam pengembangan desa wisata sebagai icon wisata desa yang terkenal di Kabupaten Bondowoso. Kelompok internal yang dibuat oleh desa untuk membantu kegiatan desa wisata adalah Pokdarwis.

Pembangunan desa wisata di Glingseran dilakukan secara musyawarah antara pemerintah desa, tokoh masyarakat dan masyarakat sendiri. Musyawarah terkait lokasi yang akan dipakai untuk wisata karena lokasi yang akan digunakan sebagai tempat wisata ada sebagian tanah milik warga.

Kegiatan wisata desa dilakukan melalui proses yaitu 1) musyawarah antara elit pemerintah, tokoh masyarakat dan masyarakat terkait dengan lokasi destinasi wisata. 2) Pendekatan dengan masyarakat karena lokasi wisata bukan saja dimiliki desa tapi ada lahan sawah milik masyarakat desa sehingga perlu adanya kesadaran terkait dengan lahan tersebut agar iklas digunakan untuk pengembangan desa wisata.

Kegiatan Desa wisata dirancang dengan sebuah perencanaan. Perencanaan yang dilakukan setelah melakukan pendekatan dengan masyarakat adalah pembentukan kelompok yang akan mengelola kegiatan wisata desa ini. Pertama perencanaan yang dilakukan adalah pembentukan kelompok sadar wisata yaitu pokdarwis. Pembentukan pokdarwis melalui musyawarah yang dipimpin oleh kades. Kedua perencanaan kegiatan desa wisata yaitu pembangunan jalan atau akses yang menuju obyek wisata. Perencanaan program kegiatan

untuk memajukan desa wisata. Pelaksanaan pengembangan desa adanya partisipasi masyarakat yang ditandai dengan kegiatan wisata secara gotong royong oleh warga masyarakat. Perencanaan yang dilakukan pokdarwis terkait dengan perencanaan infrastruktur, perencanaan sumberdana, perencanaan promosi wisata desa.

Perencanaan infrastruktur yang dibangun dalam meajukan desa wisata Glingseran adalah pembangunan akses jalan yang menuju ke tempat wisata. Kemudian merencanakan fasilitas Umum seperti MCK dan baru merencanakan pembangunan Kafe .

Kegiatan Pengembangan desa wisata yang selanjutnya adalah perencanaan sumberdana. Perencanaan sumberdana adalah kegiatan pendanaan untuk pembangunan infrasutruk pengembangan desa wisata. Sumberdana diperoleh melalui pengajuan proposal terkait perencanaan infrastruktur desa wisata yang akan diajukan ke Bumdes sebagai pengelola desa wisata. Sumber pendanaan berasal dari dana desa yang salah satu program kegiatan dana desa Glingseran adalah Bumdes. jadi pada intinya pengembangan desa wisata terkait dengan pendanaan tidak ada kendala asal semua kegiatan yang akan dilakukan oleh pokdarwis direncanakan dalam proposal kegiatan.

Pada Perencanaan selanjutnya adalah perencanaan pengelolaan desa wisata. Berdasarkan wawancara dengan ketua pokdarwis kegiatan desa wisata di Desa Glingseran akan dikelola dengan pendekatan pemberdayaan namun pemberdayaan ini belum mereka formulasi mengenai arti pemberdayaan dalam pengelolaan desa wisata karena pada saat ini pengembangan wisata desa masih pada tahapan pembangunan infrastruktur yaitu pembangunan akses jalan dan pembangunan café. Namun demikian ketua pokdarwis sedikit menyinggung terkait pemberdayaan adalah adanya kerjasama yang saling menguntungkan antara pokdarwis sebagai pengelola desa wisata dengan pihak luar sebagai penikmat desa wisata misalnya saja kerjasama dengan sekolah-sekolah di seluruh Kabupaten Bondowoso terutama sekolah dasar untuk melakukan belajar alam di desa wisata Dewi Rengganis di desa Glingseran.

Pengerjaan fisik pembangunan wisata desa dilakukan oleh masyarakat sendiri atas persetujuan kepala desa karena bagi masyarakat desa kepala desa tidak hanya sebagai pemimpin mereka tetapi sebagai orang tua dan teman. Artinya dalam kegiatan pengelolaan wisata ini modal sosial sangat berpengaruh besar terutama dalam kepercayaan antara masyarakat dan pemimpin begitu sebaliknya. aset sosial sangat berperan dalam pembangunan desa wisata di Glingseran.

Perncaanaan selajutnya adalah perencanaan promosi wisata. Meskipun masih dalam tahapan pembangunan infrastruktur Bumdes unit kegiatan desa wisata juga mempunyai perencanaan dalam promosi desa wisata. Perencanaan yang dilakukan adalah dengan menghidupkan kembali musik khas daerah yaitu musik mahe. Musik mahe adalah musik yang dimainkan sendiri oleh masyarakat desa yang merupakan kolaborasi musik tradisional dan musik elekton. Selain itu juga melakukan kerjasama dengan beberpa Club atau perkumpulan misalnya Club beat, Club senam, Club Cor (klub yang terdiri dari para pemuda desa) dan Club sepeda CB.

Manfaat desa wisata adalah melepaskan desa Glingseran dari kemiskinan atau dari kategori desa miskin. Indikator desa Glingseran lepas dari Kemiskinan yaitu infrastruktur desa sudah bagus, tingkat ekonomi masyarakat relatif baik dengan ditandai sudah tidak ada masyarakat yang memakan gaplek.

Desa wisata memberikan pekerjaan bagi masyarakat desa terutama dibidang parker sepeda. masyarakat disekitar desa wisata untuk berjualan. Pada saat ini Kegiatan desa wisata pada tahapan pembangunan sehingga banyak pembangunan yang dilakukan di tempat wisata misalnya saluran, plengsengan sungai, perbaikan jalan sehingga dapat menyerap tenaga kerja untuk bekerja di bidang bangunan.

Manfaat adanya desa wisata adalah infrastruktur desa Glingseran mejadi bagus akses jalan antar dusun satu dengan dusun yang lain bagus bahkan akses jalan yang menghubungkan desa Glingseran dengan Desa Sebelah juga bagus dampak dari akses jalan

yang bagus masyarakat bisa berdagang di tempat wisata .

Pemuda-pemuda desa Glingseran sebelum adanya desa wisata sangatlah amburadul artinya mabu -mabuk, pengangguran . Manfaat Bumdes adalah memberikan pendidikan bagi pemuda desa yang tergabung dalam kelompok pokdarwis tentang pengembangan wisata desa, ekowisata, manajemen wisata , pengelolaan wisata, komunikasi yang baik dan benar dll yang terkait dengan pendidikan wisata. Pihak yang memberikan pelatihan adalah Universitas jember sebagai pendamping desa dan Dinas pariwisata Kabupaten Bondowoso dan planer pariwisata yang disewa oleh kepala desa untuk mengajari pemuda desa tentang wisata.

Manfaat Bumdes bagi masyarakat adalah merubah kebiasaan kurang baik masyarakat desa terkait dengan kebiasaan mandi dan BAB di sungai. Perubahan kebiasaan itu melalui suatu proses pendekatan yang dilakukan oleh pokdarwis dan disertai pemberian bantuan pembuatan sumur dan PDAM oleh pemerintah desa.

Pengembangan desa wisata di Glingseran telah memberikan manfaat bagi masyarakat desanya yaitu desa Glingseran telah lepas dari desa miskin sehingga pengembangan desa wisata telah sesuai dengan filosofi perspektif Pro Poor Tourism (PPT) yaitu memberikan manfaat terutama ekonomi selain itu manfaat sosial yaitu mmberikan pendidikan bagi kelompok pemuda desa mengenai pengetahuan pariwisata sehingga dengan kegiatan ini pemuda yang tergabung dalam kelompok pokdarwis berpartisipasi aktif dan meninggalkan kebiasaan negative yaitu mabuk-mabukan. Budaya masyarakat Glingseran seperti Solawatan dan Sedekah bumi hidup kembali dengan adanya wisata desa.

Desa Wisata telah memberikan peran bagi semua sub sistem yang ada di desa Glingseran baik subsistem formal maupun informal. Peranan dalam pengembangan desa wisata yaitu adanya peranan pemimpin desa, peran tokoh masyarakat desa, peran organisasi formal desa, peran organisasi informal desa. Pemimpin desa yaitu kepala desa, tokoh masyarakat desa adalah kyai dan organisasi formal desa yaitu kelompok pokdarwis dan

organisasi informal desa yaitu organisasi keagamaan desa yang di dalamnya beranggotakan semua masyarakat desa Glingseraa. Berdasarkan dari hasil penelitian menjelaskan bahwa pengembangan pariwisata di desa Glingseran telah melibatkan semua pemangku kepentingan yang ada di desa.

Desa wisata Glingseran terbangun atas modal sosial masyarakat desa yang terdiri atas trust (kepercayaan) yaitu kepercayaan yang kuat antara masyarakat, kepala desa dan tokoh masyarakat. Nilai (Value) desa wisata telah memberikan pelajaran bagi pemuda desa yang tergabung dalam pokdarwis mengenai pelajaran ecowisata dan Networking (jaringan) yang terbentuk di desa wisata Glingseran yaitu dinas pariwisata, universitas jember dan Kementrian desa. Ketiga jaringan itu merupakan faktor eksternal yang sangat membantu dalam pengembangan pariwisata di desa Glingseran. Hal ini senada dengan pendapat Scaglione, 2011 yang menjelaskan bahwa PPT sebagai interaksi dan hubungan dengan modal sosial yang ada di masyarakat.

Strategi atau metode dalam pengembangan pariwisata di Desa Glingseran:

1. Pengembangan pariwisata desa didirikan dengan pendekatan kegiatan keagamaan dengan demikian kegiatan keagamaan desa menjadi aktif dan sebagai wadah pembentukan desa wisata
2. Perencanaan dalam pengembangan desa wisata antarlain perencanaan kelompok sadar wisata, infrastruktur, pendanaan, pengelolaan wisata dan promosi wisata.
3. Pembukaan akses jaringan desa melalui pelatihan oleh dinas pariwisata dan universitas Jember, akses bantuan infrastruktur oleh Dinas pariwisata dan Kementrian desa.
4. Peningkatan lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa Glingseran dengan pembangunan infrastruktur wisata desa.

Prinsip-prinsip pengembangan pariwisata di desa Glingseran yaitu:

1. Pengembangan wisata di desa Glingseran merupakan satu kesatuan sistem yang

terdiri atas: Pemerintah baik di tingkat desa atau Kabupaten, masyarakat desa yang tergabung dalam pokdarwis, jaringan eksternal yang terdiri atas organisasi pendidikan dan pemerintahan.

2. Perencanaan dalam pengembangan desa wisata dilakukan oleh masyarakat desa yang tergabung dalam kelompok pokdarwis dan dibantu oleh pihak eksternal desa seperti universitas Jember dan Dinas pariwisata.
3. Pengembangan desa wisata berdasarkan visi yang dibangun oleh masyarakat desa yaitu lepas dari desa miskin
4. Pengembangan desa wisata didasarkan atas aset masyarakat antarlain modal sosial dan aset sumber daya alam
5. Pengembangan desa wisata Glingseran terbangun karena adanya jaringan internal dan eksternal desa. Jaringan internal terdiri atas organisasi informal yang ada di desa dan jaringan eksternal terdiri atas organisasi eksternal di luar desa.
6. Pengembangan desa wisata telah memberikan dampak positif bagi masyarakat desa yaitu telah membuka lapangan pekerjaan baru di desa Glingseran terutama pada pembangunan infrastruktur wisata.

Kesimpulan

Pengembangan wisata di desa Glingseran telah melibatkan hubungan secara horizontal masyarakat desa secara menyeluruh dalam kegiatan keagamaan. Kegiatan keagamaan bagi masyarakat desa Glingseran sebagai sarana untuk berpartisipasi dalam perencanaan pengembangan masyarakat yaitu pengembangan desa wisata. Selain itu Pengembangan wisata desa juga telah melibatkan hubungan vertikal antara pemimpin desa, tokoh masyarakat dan jaringan eksternal di luar desa Glingseran yaitu pemerintah yaitu dinas pariwisata dan kementrian desa dan dunia pendidikan yaitu Universitas Jember. Pengembangan wisata desa Glingseran telah memberikan kesempatan bagi masyarakat desa Glingseran terutama

pemuda untuk mendapatkan pekerjaan dan pelatihan terkait dengan kegiatan wisata.

Daftar Referensi

- Binahayati Rusyidi, M. F. (2018). Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat. *Jurnal Destinasi Pariwisata*, 5(1), 144. <https://doi.org/10.24843/jdepar.2017.v05.i01.p26>
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design. Pendekatan Kualitatif Kuantitatif dan Mixed (ke tiga)*. Sage Publication.
- Darmawan, D. H., & Yunanto, A. (2016). Peluang Pariwisata Dalam Menurunkan Kemiskinan Di Era Masyarakat Ekonomi Asean (Mea). *Jurnal Riset Ekonomi Dan Manajemen*, 16(2), 199. <https://doi.org/10.17970/jrem.16.160203.id>
- Hannaji, N., Bagiastra, I. K., & Kurniansah, R. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengembangkan Pariwisata Di Desa Wisata Bayan. *Journal Of Responsible Tourism*, 2(1), 49–58.
- Mudana, I. W. (2016). Pemberdayaan Masyarakat Di Daerah Tujuan Wisata Desa Pemuteran Dalam Rangka Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 4(2), 598–608. <https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v4i2.6381>
- Neuman, L. W. (2016). *Social Research Methods*. Allyn and Bacon.
- Nursetiawan, I. (2018). Strategi Pengembangan Desa Mandiri Melalui Inovasi Bumdes. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 4(2), 72–81.
- Scaglione, M., Marx, S., & Johnson, C. (2011). Tourism and Poverty Alleviation Approaches: A Case Study Comparison. *Tourism Development after the Crises. Global Imbalances – Poverty Alleviation*, April, 207–226. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.20505.95848>
- Scheyvens, R., & Momsen, J. H. (2008). Tourism and poverty reduction: Issues for small island states. *Tourism Geographies*, 10(1), 22–41. <https://doi.org/10.1080/14616680701825115>
- Sunyoto dan E. Widayati. (2021). Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pengembangan Pariwisata Berbasis Komunitas. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2013–2015.